

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan produksi susu dalam negeri untuk mengantisipasi tingginya permintaan susu. Hal tersebut memberikan peluang bagi peternak, terutama peternakan sapi perah rakyat untuk lebih meningkatkan produksi, sehingga ketergantungan akan susu impor dapat dikurangi. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut, perlu ditunjang oleh perkembangan peternakan sapi perah agar eksis dalam penyediaan produksi susu dan dapat terjaga kelangsungan hidupnya.

Usaha ternak sapi perah adalah usaha yang mempunyai sifat maju, yang secara selektif menggunakan masukan teknologi sehingga secara proporsional mampu meningkatkan produksi akan tetapi dalam prakteknya para peternak tidak sepenuhnya memahami penggunaan teknologi tersebut.

Pemeliharaan sapi perah masih menggunakan teknologi yang bersifat sederhana dalam pemeliharaan sapi perah, dimana pengetahuan pemeliharaan sapi perah peternak masih didapat secara turun temurun, dan merupakan usaha sampingan. Setiap usaha mengharapkan keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan faktor - faktor produksi yang dimiliki para peternak.

Menurut Swastika menyatakan bahwa peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh.

Rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas ternak tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya modal, serta pengetahuan atau ketrampilan petani yang mencakup aspek produksi, pemberian pakan, pengelolaan hasil pasca panen, penerapan sistem recording, pemerahan, sanitasi dan pencegahan penyakit. Pengetahuan petani mengenai aspek tataniaga masih harus ditingkatkan sehingga keuntungan yang diperoleh sebanding dengan pemeliharaannya. Keuntungan tersebut dapat terjadi jika peternak memiliki manajemen yang baik meningkatkan skala usaha, meningkatkan frekuensi pemerahan, memberikan pakan yang cukup dan berkualitas. Peternak harus menekan biaya produksi sehingga dapat keuntungan yang lebih maksimal di dalam usaha ternak.

Keuntungan akan terjadi jika pendapatan peternak tinggi, dan biaya produksi rendah, sehingga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Peternak sapi perah Indonesia kurang memiliki pengetahuan tentang tata cara beternak sapi yang baik dan benar, sehingga produktifitas susu yang dihasilkan sapi rendah. Rata - rata peternak sapi perah di Indonesia lebih banyak belajar secara turun - temurun, tidak ada ilmu baru yang mereka terima dari ilmu warisan nenek moyang mereka.

Sedangkan menurut Dawud susu di Indonesia berkualitas rendah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

Pertama, sanitasi kandang yang rendah dan perilaku peternak yang belum mengarah pada *goodfarming practice*. Banyak peternak yang membangun kandang sapi mereka menyatu dengan rumah alasan keamanan. Limbah peternakan, baik limbah yang padat maupun limbah yang cair, belum dikelola dengan benar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Padahal, jika pengelolaan limbah dilakukan dengan benar, dapat memberikan nilai tambah bagi usaha. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa sistem usaha peternakan yang menerapkan produksi bersih dapat memberikan keuntungan yang cukup signifikan.

Kedua, kualitas dan kuantitas pakan yang rendah. Kebanyakan peternak sapi perah masih memberikan pakan berkualitas rendah kepada ternak mereka. Hanya terdiri atas pakan hijauan dan rumput alam, ditambah limbah tanaman pangan (wortel, kol, dan lain-lain). Selain mutu pakan yang rendah, secara kuantitas, pemberian pakan kepada ternak sapi pun kerap kali kurang. Hal ini menyebabkan kecukupan pakan 10 persen dari berat badan tidak terpenuhi.

Penyebab produksi susu sapi di Indonesia rendah karena sedikitnya orang yang ingin menjadi peternak sapi perah. Mereka beranggapan kalau menjadi peternak sapi perah akan memperoleh laba yang kecil dan harus ekstra dalam penjagaan dan pemeliharaan sapi perah mereka tersebut.

Rendahnya produksi susu disebabkan oleh beberapa faktor penentu dalam usaha peternakan yaitu pemuliaan dan reproduksi, penyediaan dan pemberian pakan, pemeliharaan ternak, penyediaan sarana dan prasarana, serta pencegahan penyakit dan pengobatan.

Penyediaan bahan pakan sapi perah harus mempertimbangkan faktor palatabilitas, nilai nutrisi, ketersediaan dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, serta harga terjangkau. Sapi perah hendaknya diberi dua kelompok pakan yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan hijauan merupakan pakan utama ruminansia karena melalui fermentasi di dalam rumen oleh mikroba, serta dapat menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Sementara pakan konsentrat adalah campuran bahan pakan yang kaya energi dan protein, yang berguna untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas susu sapi perah laktasi.

Dalam kenyataannya peternak Sapi perah kebanyakan berada di desa – desa hal ini sangat beralasan, mengingat didesa banyak tersedia rerumputan hijau sebagai bahan makanan ternak. Pemerintahan desa mempunyai peran yang sangat penting didalam pemberdayaan peternak sapi perah, mengingat desa merupakan sistem pemerintahan yang berada dilevel paling bawah sehingga bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah, semisal masyarakat peternak sapi perah. Dalam kegiatannya kepala desa secara langsung memberikan pelayanan publik berupa penyuluhan kepada masyarakat peternak sapi.

Sebagai pelayan publik yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat didesa, kepala desa perlu membentuk satuan-satuan kerja atau unit pelayanan yang mempunyai lokasi pelayanan yang menetap yaitu sebuah kantor kepala desa. Sehingga masyarakat yang berada didesa secara mudah dapat mengakses atau menjangkau pihak - pihak yang bertugas memberikan pelayanan tersebut.

Selain itu diperlukan para pejabat atau petugas pemberi pelayanan publik yang mempunyai kemampuan yang dapat memahami segala kebutuhan masyarakat yang datang ke Kantor Desa. Dalam kondisi seperti ini seorang Kepala Desa tidak bekerja sendiri dalam melayani masyarakat, akan tetapi Kepala Desa dibantu oleh masyarakat dan staf - staf dan sekretaris desa.

Seorang Kepala Desa sebenarnya tidak berupaya sendiri dalam mengeluarkan kebijakan publik terkait dengan pelayanan publik, namun ada beberapa organisasi lainnya yang juga mempunyai andil besar dalam menentukan kebijakan yang lebih baik terkait dengan kebijakan pelayanan publik. Salah satunya ialah Lembaga Ketahanan Desa yang dalam kegiatannya secara umum membantu Kepala Desa dalam urusan desa.

Selain Lembaga Ketahanan Desa yang membantu dalam mengeluarkan kebijakan desa juga terdapat organisasi lain yang juga memantau akan jalannya pemerintahan yang ada di desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terhadap masyarakat desa, organisasi tersebut ialah Badan Permusyawaratan Desa. Dalam kegiatannya secara organisasi

Badan Permusyawaratan Desa menjadi mitra Kepala Desa terutama dalam penyusunan kebijakan publik serta penyusunan Peraturan Desa.

Oleh sebab itu dalam kegiatan yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat ditingkat bawah, maka perlu dipersiapkan perencanaan yang matang dan perlu adanya bentuk - bentuk pelayanan yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan. Karena tujuan penting dari Kepala Desa itu adalah tentang kebijakan seperti apa yang harus diambil agar masyarakat desa mendapatkan apa yang diperlukan guna memberikan kelancaran.

Senada dengan pengertian diatas, peranan Pemerintah Desa sangat dibutuhkan pada dunia peternakan, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pemberdayaan yang didorong oleh Pemerintah, baik oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat. Semua ini dilakukan guna untuk memajukan para peternak Sapi Perah.

Dengan berpijak pada realitas pemikiran diatas maka Peneliti bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yaitu menganalisis tentang “ *Peranan Pemerintah Desa Puduk Wetan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Dalam Memberdayakan Peternak Sapi Perah* ”, dengan studi penelitian di area peternakan Sapi Perah di Desa Puduk Wetan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan ”.¹

Masalah dapat muncul apabila terjadi keadaan ketidak sesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

“ Bagaimanakah peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam memberdayakan peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? ”.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam memberdayakan peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat hasil penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang berjudul Peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam

¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, halaman 1051.

memberdayakan peternak Sapi Perah, dengan studi penelitian di area peternakan Sapi Perah di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ini ialah :

1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis antara lain :

- 1) Dapat diperoleh bahan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam memberdayakan peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Hasil penelitian ini dapat berguna bagi penelitian sejenisnya yang selanjutnya.

1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis antara lain :

- 1) Bagi Peneliti : Selain sebagai bahan laporan penyusunan tugas akhir (Skripsi), penelitian ini juga berguna sebagai alat belajar guna menerapkan teori - teori yang sudah didapatkan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- 3) Bagi Pemerintah Desa : Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan memberdayakan peternak sapi perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Bagi Masyarakat, khususnya para peternak sapi perah : Hasil penelitian ini bisa membawa masyarakat lebih berperan aktif

dalam pelaksanaannya guna ikut serta dalam berternak sapi perah.

1.5 Penegasan istilah

Guna menekan kekeliruan dan pemahaman tentang istilah atau variabel yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan definisi secara konseptual. Adapun yang menjadi variable-variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.5.1 Peranan

Menurut Miftah Toha dalam bukunya yang berjudul “ Pembinaan Organisasi ”, beliau mengutarakan bahwa :

Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang.²

Sedangkan menurut Groos dkk mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan dalam individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.³

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁴

². Miftah Toha, 1993, Pembinaan Organisasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 80.

³. David B, 1982, Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 99.

⁴. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit.*

1.5.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang artinya memiliki kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan artinya suatu usaha supaya yg diberdayakan memiliki kekuatan atau kemampuan atau menjadi kuat atau mampu (ekonomi, politik, pendidikan, visi, harga diri, partisipasi).

1.5.3 Pemerintah

Pemerintah ialah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

1.5.4 Budidaya

Budidaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang memberikan hasil atau keuntungan bagi pembudidaya tersebut. Budidaya sapi perah adalah usaha di bidang peternakan yang difokuskan untuk menghasilkan susu dari sapi perah.

1.5.5 Sapi perah

Sapi perah adalah sapi yang ditanakkan terutama sebagai penghasil susu.

1.6 Landasan teori

Landasan berasal dari kata landas yang berarti alas, tumpuan dan kemudian mendapat akhiran-an menjadi landasan yang berarti alas dasar tumpuan. Kemudian teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai peristiwa.

Menurut Prof. Bintoro Tjokro Amidjojo mengemukakan bahwa :

“ Teori dapat diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara sebagai gejala atau antara perubahan (variable) dalam bidang tertentu, sehingga dapat dipergunakan sebagai rangka berfikir dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut ”. ⁵

Sedangkan menurut Djarwanto mengemukakan bahwa :

“ Setiap penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu penemuan baru atau menjawab suatu pertanyaan, selalu memerlukan pedoman. Di dalam penelitian ilmiah diperlukan teori yang cukup, teori ini berfungsi sebagai pedoman guna mempermudah jalannya penelitian dan sebagai pegangan pokok bagi si peneliti. Di samping sebagai pedoman, teori adalah merupakan salah satu sumber inspirasi bagi peneliti di dalam memecahkan masalah-masalah penelitian ”. ⁶

Dengan berpijak pada realitas pemikiran diatas maka dalam peneliti ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yaitu menyimpulkan bahwa landasan teori adalah suatu dasar yang digunakan sebagai pedoman untuk mengemukakan pendapat dari suatu peristiwa atau kejadian yang ada dimasyarakat.

⁵. Prof. Bintoro, Pengantar tentang teori dan strategi pembangunan nasional, Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 12.

⁶. Djarwanto, Pokok-pokok metode riset dan bimbingan teknis penulisan skripsi, liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 11.

1.6.1 Teori peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa ”.⁷

Dikemukakan pula oleh Thibaut dan Keley bahwa, “ Peranan merupakan suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang oleh orang lain bila ia melakukan intraksi dengan mereka ”.⁸

Menurut Groos dkk mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan dalam individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁹

Di dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu :

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh si-pemegang peran terhadap “masyarakat ” atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Implikasi yang paling penting dari “ pengambilan peranan ” adalah bahwa dengan menempatkan dirinya dalam peranan orang lain dan memperkirakan tingkah laku orang lain, maka seseorang individu akan mampu membuat respon yang dituntut dalam rangka menampilkan sikap yang diinginkan oleh orang lain walaupun individu tersebut sebenarnya tidak memiliki sikap yang ditampilkan itu. Jadi, dalam “ role playing ”, individu-individu belajar mengatur dan mengendalikan kesan yang mereka

⁷. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, halaman 751.

⁸. Djarwanto, *Op Cit*, halaman 15.

⁹. David, *Op Cit*, halaman 99.

kembangkan untuk menampilkan respon-respon yang diharapkan oleh orang lain.

Di dalam Sosiologi, konsep “ peranan ” sebenarnya berasal dari analogi dramatik (sandiwara). Di dalam dunia nyata seseorang memainkan bermacam-macam peranan, semisal : sebagai dosen, buruh, guru, petani dan lain sebagainya sebagaimana seorang aktor memerankan perannya di atas pentas. Analogi dasar yang dipergunakan para sosiolog mencerminkan kata-kata Shakespeare dalam karyanya “ *As You Like It* ” yang berbunyi :

“ All the World’s a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts ”.

Yang berarti : “ *Dunia ini hanya panggung sandiwara dimana orang-orang jadi pemainnya, mereka punya tempat masuk dan tempat keluar, dan seseorang pemain memerankan beberapa peranan sekaligus ”.*

10

Menurut Robert E. Park : “ Setiap orang dimana saja, selalu (kurang lebih) dengan sadar memainkan peranannya dalam peran-peran inilah kita mengenal satu sama lain dan dalam peran inilah kita mengenal diri sendiri ”.¹¹

1.6.2 Pemerintah desa

Pemerintah merupakan organisasi dari suatu negara. Pemerintahan yang tersusun rapi dan stabil merupakan hak mutlak bagi kelangsungan

¹⁰. David, *Ibid*, halaman 139.

¹¹. David, *Ibid*, halaman 143.

hidup suatu negara. Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dalam suatu lembaga pemerintah.

Dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang pemimpin, seorang Kepala Desa harus cakap, mampu, dan mengetahui kondisi dan situasi di dalam kepemimpinannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang Kepala Desa dituntut memiliki kecakapan dalam beberapa hal, diantaranya ialah :

a. Kreatifitas.

Kreatifitas merupakan faktor yang turut mendorong akan keberhasilan suatu program pembangunan, karena merupakan perwujudan dari gagasan-gagasan dan saran-saran seorang Kepala Daerah dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Peyuluhan.

Peyuluhan merupakan faktor yang penting dalam rangka mengarahkan dan mendidik masyarakat agar masyarakat bisa menerima dan menciptakan pembaharuan yang sesuai dengan modernisasi.

c. Peninjauan.

Peninjauan merupakan suatu kegiatan untuk melihat dari dekat suatu obyek yang ditinjau. Dengan adanya peninjauan diharapkan seseorang dapat memberikan tanggapan dan kesan baik sehingga dapat mendorong untuk meningkatkan prestasi.

Dengan memiliki kecakapan seperti diatas maka, diharapkan seorang Kepala Desa yang merupakan tulang punggung pelaksanaan

pemerintahan dapat membawa masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 atau Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa seorang Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin peyelenggaraan pemerintah desa dengan menjalankan wewenang dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Tugas seorang Kepala Desa ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam menjalankan kewajibannya seorang Kepala Desa mempunyai tugas, diantaranya ialah :
 - a. Memimpin peyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Permusyawaratan Desa.
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Dewan Permusyawaratan Desa.
 - e. Membina kehidupan masyarakat.
 - f. Membina perekonomian desa.
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Kewajiban seorang Kepala Desa, diantaranya ialah :
- a. Memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengembangkan pendapatan masyarakat.
 - c. Mendamaikan perselisihan masyarakat.
 - d. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 - e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 - f. Meyelenggarakan pemerintahan dengan baik.
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang-undangan.
 - h. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan.
 - i. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 - j. Melaksanakan kehidupan yang demokrasi.
 - k. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - l. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 - n. Memberdayakan masyarakat.

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu seorang Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Dewan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus tersebut sehingga setiap desa diberi kewenangan. Adapun kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan setiap desa, diantaranya ialah :

1. Mengurus jalannya pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul daerah, dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengurus pemerintahan pusat maupun pemerintah propinsi maupun Kabupaten ayau Kota yang menjadi kewenangan Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan Kabupaten atau Kota, yang wajib disertai dukungan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang lebih atas merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan Peraturan Daerah kabupaten atau kota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri.

Pemerintah Desa dapat pula dibebani tugas pembantuan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah propinsi dengan syarat tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa tersebut harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.6.3 Teori membangun potensi desa

Kata “ membangun ” berasal dari kata dasar “ bangun ” yang kemudian mendapatkan imbuhan “ mem ”, kata bangun berarti bangkit atau berdiri.

Imbuhan “ mem ” bermaksud proses, cara, pembuatan. Jadi, kata membangun mengandung pengertian proses atau cara untuk bangkit atau berdiri dari ketertinggalan atau kekurangan menjadi kecukupan atau kemajuan.

Pembangunan nasional di Indonesia, merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja, dan memang dikehendaki baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pembangunan menurut Prof. Bintoro, adalah :

“ Pembangunan merupakan suatu proses disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu ”.¹²

Senada dengan Wahyudi Kumorotomo, beliau mengutarakan bahwa:

“ Pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik ”.¹³

¹². Prof. Bintoro, *Op Cit*, halaman 9.

¹³. Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, halaman 23.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat didefinisikan bahwa ciri-ciri pembangunan potensi yang ada disuatu wilayah adalah :

- a. Pembangunan dilakukan secara terencana.
- b. Pembangunan merupakan suatu proses keadaan.
- c. Perubahan tersebut dilakukan secara sadar dan terarah kesuatu tujuan.
- d. Tujuan yang dimaksud dicapai melalui kegiatan pembangunan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pembangunan suatu daerah atau wilayah menurut Drs Taliziduhu Draha, pembangunan daerah atau wilayah ialah :

“ Suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan Nasional ”. ¹⁴

Hal senada diungkapkan oleh I Nyoman Beratha yang menyatakan bahwa :

“ Pembangunan daerah adalah dari masyarakat unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis, dan terarah sebagai bagian penting dari pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh ”. ¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu gerakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik

¹⁴. Taliziduhu Draha, 1981, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bina Aksara, Jakarta, halaman 9.

¹⁵. I Nyoman Beratha, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ghalia, Jakarta, 1982, halaman 35.

bagi seluruh masyarakat dimana masyarakat sebagai subyek pembangunan secara langsung.

Dengan demikian pembangunan potensi daerah atau wilayah memerlukan usaha antara pemerintah dengan masyarakat demi kebaikan dan peningkatan hidup mereka, karena pembangunan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan potensi disuatu daerah atau wilayah mempunyai beberapa sifat, diantaranya :

1. Sebagai metode pembangunan dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa.
2. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasinya dalam bentuk program yang melibatkan masyarakat disetiap kegiatannya.
3. Sebagai gerakan dimana harus dilaksanakan secara menyeluruh, maka diperlukan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan roda pemerintahan yang dilandasi oleh kesadaran dari masing-masing masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas maka dapat penulis tarik sebuah kesimpulan bahwasanya membangun sebuah potensi yang ada disuatu daerah atau wilayah mengandung sifat sebagai metode pembangunan, sebagai program dan sebagai gerakan yang kesemuanya selalu membutuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan, yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Agar proses pembangunan potensi disuatu daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pembangunan tersebut harus selalu berpedoman pada perencanaan pembangunan.

Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran dan penentu secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Maka, perencanaan pembangunan suatu daerah atau wilayah sesuai dengan cita-cita demokrasi yaitu perencanaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional ”.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka daerah merupakan subyek pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah yang lebih atas, untuk itu perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh daerah itu sendiri dan bukan dari pemerintah yang lebih tinggi, sehingga melalui proses yang diharapkan atau yang diinginkan. Kebutuhan yang diinginkan masyarakat dapat tertampung dalam setiap kegiatan pembangunan.

¹⁶. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Bab VIII, Halaman 155.

Sehubungan dengan uraian diatas, langkah-langkah utama dalam penyusunan suatu rencana pembangunan potensi disuatu daerah, adalah sebagai berikut :

1. Studi keadaan masa lalu, keadaan masa sekarang dan keadaan yang akan datang.
2. Penentuan dalam menghadapi masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada berdasarkan analisa hasil studi.
3. Tindakan dilaksanakan didasarkan pada tahapan-tahapan prioritas pembangunan dalam rangka pola pembangunan Nasional dan Daerah.
4. Melihat tindakan-tindakan itu dengan kondisi-kondisi yang terarah.

Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa, perencanaan pembangunan potensi daerah haruslah benar-benar membutuhkan suatu perencanaan yang matang agar berhasil dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Disamping itu pembangunan potensi yang ada disuatu wilayah seharusnya membutuhkan partisipasi masyarakat sehingga keberhasilan mudah tercapai.

Dalam proses pembangunan potensi daerah diperlukan unsur-unsur pendukung sebagai mekanisme pembangunan, adapun unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Unsur Pemerintah.
2. Unsur Masyarakat.

Unsur Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan bimbingan, arahan, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Sedangkan masyarakat berkewajiban berpartisipasi untuk ikut bersama-sama memajukan daerahnya. Senada dengan hal ini A. Suryadi mengatakan bahwa :

“ Mekanisme membangun potensi yang ada disuatu daerah merupakan hal yang serasi antara kegiatan pemerintah disatu pihak dan kegiatan partisipasi masyarakat dipihak lain, bahkan pembangunan dilakukan masyarakat itu sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan-bantuan dan pembinaan serta pengawasan yang terarah , terkoordinir agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya ”.¹⁷

Dengan demikian unsur pemerintah dan unsur masyarakat merupakan unsur yang terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan, karena tanpa dukungan dari salah satu unsur tersebut pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita - citakan.

Pada hakekatnya memberdayakan masyarakat mempunyai dua makna, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat malalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Memberikan wewenang secara propesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan

¹⁷. A. Suryadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, PT. Alumni, Bandung, 1998, halaman 17.

secara mandiri. Hal ini berarti bahwa upaya memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Oleh sebab itu, maka diperlukan etika pembangunan yang harus diterapkan oleh aparat pemerintah dalam rangka mengoptimalkan potensi desa sekaligus memberdayakan masyarakat. Adapun etika tersebut ialah :

1. Memahami aspirasi masyarakat.
2. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan.
3. Melakukan dialog dan memberikan informasi bagi masyarakat.
4. Menciptakan instrumen dalam bentuk peraturan yang berpihak pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan potensi desa agar tercapai sesuai dengan apa yang dicita-citakan, maka, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan kegiatan.

Pada tahap ini dengan memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat, mengkaji penyebab masalah, menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi yang dimiliki.

2. Tahap pengkajian keadaan atau situasi desa.

Dalam tahapan ini terjadi pengkajian terkait dengan keadaan desa, baik meliputi keadaan keuangan maupun keadaan sumber daya manusia yang memadai.

3. Tahap pelaksanaan.

Dalam tahapan ini peran masyarakat sangat diharapkan sebagai perwujudan tingkat gotong-royong dan kemandirian dalam pembangunan.

4. Tahap monitoring.

Dalam tahapan ini, merupakan tahapan memfasilitasi masyarakat untuk menilai hasil program yang perencanaan dan pelaksanaannya dikelola sendiri oleh masyarakat. Penilaian dilakukan untuk melihat perubahan keadaan kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh pengembangan program, meliputi :

- a. Perbandingan keadaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya program.
- b. Masalah atau kebutuhan-kebutuhan apa yang telah atau belum terselesaikan.
- c. Potensi-potensi apa saja yang masih belum dikembangkan.

5. Tahap evaluasi.

Bagi masyarakat kegiatan ini menimbulkan kesadaran tentang berbagai hal yang mempengaruhi upaya mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Apabila masyarakat telah memiliki kemampuan, kegiatan lanjutan untuk meningkatkan masyarakat akan terus dilakukan.

Dengan melalui tahapan-tahapan diatas diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, yaitu perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat, serta pengembangan wilayah sebagai potensi sosial, ekonomi,

budaya dan hukum, menuju terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 pasal 88 tentang pemberdayaan, menyebutkan bahwa :

“ Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan wajib pajak mengikut sertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ”. ¹⁸

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka perlu mengetahui permasalahan pokok dalam upaya pemberdayaan masyarakat, adapun permasalahan pokok tersebut, yaitu :

1. Aspek peningkatan, kesejahteraan masyarakat meliputi kurangnya perhatian untuk mengembangkan jaringan kerja usaha ekonomi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam proses produksi secara kompetitif, dan terbatasnya input sumber daya ekonomi kapital, informasi pengetahuan dan ketrampilan serta kelembagaan.
2. Aspek peningkatan martabat yang meliputi kondisi kemiskinan, terbatasnya dukungan pelayanan sosial dan keterampilan serta kelembagaan.
3. Aspek terhadap masyarakat yang menyangkut kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ketergantungan terhadap pemerintah dan hilangnya nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

¹⁸. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010, Tentang Desa, Bab VI.

1.6.4 Definisi operasional

Menurut Sofian Effendi “ Definisi operasional ialah : merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur ”.¹⁹

Agar didalam penelitian ini memperoleh data yang valid dan sesuai dengan keadaan dilapangan, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian dengan menentukan indikator-indikator.

Indikator-indikator dari variable penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam memberdayakan peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo :
 - a. Bagaimana usaha Pemerintah Desa.
 - b. Bagaimana realisasinya usaha tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi akan eksistensi pengusaha peternak Sapi Perah, baik faktor penghalang maupun pendukung.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Pengertian metode penelitian

Menurut pendapat Suharsimi metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data, yang tentunya besar pengaruhnya terhadap tujuan penelitian yang akan dicapai.²⁰ Oleh sebab itulah metode penelitian merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam suatu penelitian.

¹⁹. Masri M dan Sofian E, 1987, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, halaman 23.

²⁰. Suharsimi Arikunto, 1992, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 185.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Metode adalah cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan ”.²¹

1.7.2 Lokasi penelitian

Penulis melakukan penelitian diarea peternakan sapi perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

Adapun pertimbangan penulis memilih area tersebut sebagai daerah penelitian, yaitu :

Di area tersebut merupakan sentral peternakan sapi perah.

1.7.3 Bentuk dan starategi penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian perlu diketahui tentang metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis data.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan jenis Deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat, mengenai masalah yang diteliti, hal ini dilakukan agar diperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan keinginan, sehingga penelitian ini sesuai dengan apa yang diinginkan.

Penggunaan metode penelitian deskriptif karena menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan pada faktor-faktor yang nampak, serta untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya Peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam

²¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, halaman 652.

memberdayakan peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

1.7.4 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan dapat dijamin validitasnya, maka informasi diperoleh dari :

- a. Peternak Sapi Perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- b. Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

1.7.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Pokok (Primer) :
 - a) Wawancara.

Dalam rangka mengumpulkan data yang valid yang sesuai dengan fakta dilapangan, maka dilakukanlah sebuah wawancara, untuk mendapatkan data yang di inginkan.

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²²

²². Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, halaman 65.

2. Metode Bantu (Sekunder) :

a) Dokumentasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari referensi, arsip dan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang obyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.²³

b) Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian dengan memperhatikan dan mempelajari situasi dan kondisi obyek penelitian.

1.7.6 Teknik penentuan jumlah populasi dan informan

a. Populasi adalah “ keseluruhan fakta dari hal yang diteliti ”.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari pengusaha peternak

²³ . Haribertus Sutopo, *Op Cit*, halaman 45

²⁴ . Pangestu Subagyo, 1996, *Statistik Deskriptif*, BPFE, Yogyakarta.

sapi perah yang ada di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

- b. Informan adalah “ bagian dari semua fakta yang dianggap dapat memberi informasi yang dapat mewakili semuanya ”.²⁵

Karena yang diteliti dalam penelitian ini adalah peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam memberdayakan peternak Sapi Perah, maka informan dalam penelitian ini terdiri dari peternak Sapi Perah dan dari Pemerintah desa.

1.7.7 Analisis data

Setelah data diperoleh kemudian data diolah dan dianalisis, analisis ini merupakan faktor penting karena, mempengaruhi mutu dari hasil penelitian. Penulis melakukan analisis data secara Diskriptif kualitatif dengan model interaktif, menurut Heribertus, adalah :

“ Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, menyajikan data dan kemudian merakit kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan yang lainnya secara sistematis ”.

²⁶

Dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti. Ketiga komponen tersebut ialah :

²⁵. Pangestu Subagyo, *Ibid.*

²⁶. Haribertus Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1991, halaman 33.

a. Reduksi data.

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data, abstraksi, data besar yang ada dalam filad note (catatan lapangan). Proses ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian.

Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual tentang kasus, tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai. Proses reduksi data ini terus berlangsung sampai akhir laporan penelitian ini selesai dikerjakan. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis data yang mempertegas memusatkan data dan mengatur data.

b. Sajian data.

Sajian data merupakan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan, pada sajian data ini data yang disajikan diambil dari data yang telah disederhanakan dalam reduksi data. Pada bagian ini susunan sajian data yang baik adalah yang jelas sistematisnya, karena hal ini akan banyak membantu peneliti dalam memahami data yang ada dan memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. Sajian data ini juga memberikan argumentasi yang logis yang mengacu kepada pengambilan keputusan atas dasar data yang diambil dalam bagian ini kearah penarikan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses dimana suatu analisis (reduksi data dan analisis data) yang dilakukan semakin lama semakin jelas. Sejak awal penelitian, peneliti sudah harus mengerti dan tanggap terhadap hal-hal yang dijumpai selama penelitian.

Kesimpulan yang perlu diverifikasi berupa pengulangan secara cepat, yang dapat dilakukan dengan diskusi atau saling meriview antar teman untuk mengembangkan apa yang dimaksud dengan korelasi antar subyek, karena pada dasarnya makna dari sebuah data harus diuji validitasnya, dengan tujuan agar lebih akurat.

Ketiga komponen analisis data diatas merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan terkait satu dengan yang lainnya.